PERLAKUAN AKUNTANSI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA LAPORAN TAHUNAN PT. PLN (PERSERO) DI SURABAYA

ARTIKEL ILMIAH

DISUSUN OLEH

DIAN OKTARINA

NIM : 2009310118

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2013

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama	:	Dian Oktarina
Tempat, Tanggal Lahir	:	Surabaya, 26 Oktober 1990
N.I.M	:	2009310118
Jurusan	:	Akuntansi
Program Pendidikan	:	Strata 1
Konsentrasi	:	Akuntansi Keuangan
Judul:	:	Perlakuan Akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Laporan Tahunan PT. PLN (Persero) di Surabaya

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing

Tanggal : 27 Maret 2013

(Dra. Gunasti Hudiwinarsih, Ak.,M.Si.)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Tanggal :

(Supriyati, SE., M.Si., Ak.)

PERLAKUAN AKUNTANSI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA LAPORAN TAHUNAN PT. PLN (PERSERO) DI SURABAYA

Dian Oktarina
STIE Perbanas Surabaya
Email: 2009310118@students.perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo 34 -36 Surabaya

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) is a company's responbility for the environment and surrounding communities which will be have an impact of company's sustainability (going concern). Present, isn't just voluntary activity but it has become a mandatory activities that has been regulated in the Act No. 40 of 2007. Implementation of these activities will be also reported in the annual reports as company's tranparancy to the stakeholders. The accounting treatment for the Corporate Social Responsibility (CSR) is still pros and cons, because there isn't standart regulation. From the amount of spent, these activities can be treated as an expense of the company, but when we look as the benefits that will be received by the company at the time of the future, the accounting treatment is as intangible assets such as brand image of the company in the public. PT. PLN (Persero) is a company that has implemented Corporate Social Responsibility (CSR) since 2010 until now, not only at head-office, but also at their units. Based on the accounting policies has been adopted by the PT. PLN (Persero) has been treated Corporate Social Responsibility (CSR) as an expense of incoming to other expenses of the company.

Key words : Corporate Social Responsibility (CSR), Expense, PT. PLN (Persero)

PENDAHULUAN

Eksistensi perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Hubungan resiprokal (timbal balik) antara perusahaan dengan masyarakat pasti terjadi. Perusahaan dan masyarakat adalah pasangan hidup yang saling memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Aspek penting tersebut yang harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat (Anggara, 2010).

Aspek ekonomi memusatkan perusahaan untuk berorientasi mendapatkan keuntungan, sedangkan pada aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab dalam perolehan keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Anggara, 2010). Pergeseran pemikiran terhadap tanggung jawab pengelolaan organisasi yang semula hanya kepada *stockholders* (pemilik/pemegang saham) menjadi pada *stakeholders* (pemilik, karyawan, pemerintah dan masyarakat luas) (Nelly, 2011). Tekanan dan tuntutan *stakeholders* ini direspon oleh perusahaan dengan menunjukkan berbagai bentuk aktifitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial mereka

pada masyarakat dan lingkungan. (Nelly, 2011).

Saat perusahaan mulai berkembang, kesadaran dalam mengurangi dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan perlu ditingkatkan oleh masing-masing perusahaan. Saat ini, *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya kegiatan sukarela, namun sudah menjadi kewajiban perusahaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan pada 20 Juli 2007. Dalam pasal 74, dinyatakan bahwa : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ini, perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, 2007). Sanksi pidana mengenai pelanggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, 1997).

Perlakuan aktivitas/tanggung jawab sosial perusahaan perlu dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dan bentuk komunikasi perusahaan terhadap para *stakeholder*-nya mengenai kinerja dan kondisi perusahaan (Angling, 2010). Perlakuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) setiap perusahaan berbeda-beda. Jika perusahaan memperlakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai investasi perusahaan yang berupa aset tidak berwujud dalam neraca perusahaan maka nantinya akan memberikan manfaat ekonomis dalam jangka panjang. Berbeda jika *Corporate Social Responsibility* (CSR) diperlakukan sebagai beban, maka nantinya *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini akan masuk ke dalam laporan laba rugi yang akan mengurangi laba perusahaan yang menyebabkan investor tidak tertarik untuk menanamkan saham ke dalam perusahaan tersebut. Namun, dengan laba yang kecil, perusahaan dapat mengambil keuntungan karena pengenaan pajak perusahaan oleh pemerintah juga akan semakin kecil sehingga kewajiban perusahaan untuk membayar pajak menjadi berkurang.

Salah satu perusahaan yang telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah PT. PLN (Persero) di Surabaya di mana perusahaan tersebut telah melaksanakan kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diantaranya adalah kegiatan *Community relation, Community Services, Community Empowering* dan Pelestarian alam. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut tentunya melibatkan aliran dana perusahaan baik *outflow* ataupun *inflow*. Seperti yang diketahui, bahwa ketika terjadinya transaksi yang berkaitan dengan aliran dana perusahaan, maka seharusnya dibuatlah laporan mengenai hal itu. Namun, yang membuat berbeda adalah aliran dana tersebut mengalir bukan digunakan untuk aktifitas operasi atau investasi perusahaan yang sudah jelas apakah itu sebagai beban

ataukah sebagai investasi perusahaan berupa aset tidak berwujud yang nantinya tiap tahun juga akan dilakukan amortisasi, melainkan untuk aktifitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan di mana tidak ada penjelasan dan perlakuan akuntansi khusus untuk aktifitas tersebut di dalam standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yaitu di Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK). Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berfokus pada "PERLAKUAN AKUNTANSI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA LAPORAN TAHUNAN PT. PLN (PERSERO) DI SURABAYA"

RERANGKA TEORITIS

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) bermakna bahwa suatu perusahaan harus bertanggung jawab atas setiap tindakannya yang berdampak pada masyarakat, komunitas mereka dan lingkungan (Andreas, 2010, p. 25). Hal itu dapat dilakukan dengan investasi pada sektor-sektor ramah lingkungan, menjaga keseimbangan eksploitasi, pengolahan limbah (daur ulang limbah), menaikkan pengeluaran-pengeluaran sosial (biaya sosial) serta cara lain guna menjaga keseimbangan lingkungan dan sejenisnya. Biaya-biaya tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan perusahaan dengan harapan masyarakat dan lingkungan (Nor, 2010, p. vi).

Pentingnya *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Beberapa teori berikut ini menjelaskan mengenai pentingnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk dilaksanakan dalam suatu organisasi atau perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut (Lako, 2010, pp. 5-6) :

a. Teori Stakeholder

Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Jika mampu, perusahaan bakal meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta laba. Prespektif teori *stakeholder* menyatakan bahwa masyarakat dan lingkungan merupakan *stakeholder* inti perusahaan yang harus diperhatikan.

b. Teori Legitimasi

Prespektif teori legitimasi mengemukakan bahwa perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terkait dalam suatu *"social contract"* .

c. Teori Kontrak Sosial

Menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat di mana masyarakat memberi *costs* dan *benefits* untuk keberlanjutan suatu korporasi. Oleh karena itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat suka rela.

d. Teori Sustainabilitas Korporasi

Menurut teori ini, agar bisa hidup dan tumbuh secara berkelanjutan, korporasi harus mengintegrasikan tujuan bisnis dengan tujuan sosial dan ekologi secara utuh. Pembangunan bisnis harus berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan secara terpadu, serta tidak mengorbankan kepentingan generasi-generasi berikutnya untuk hidup dan memenuhi kebutuhannya. Perspektif teori ini menyatakan bahwa masyarakat dan lingkungan adalah pilar dasar dan utama yang menentukan keberhasilan bisnis suatu

perusahaan sehingga harus selalu diproteksi dan diberdayakan.

e. Teori Political Economy

Menurut teori ini, domain ekonomi tidak dapat diisolasikan dari lingkungan di mana transaksi-transaksi ekonomi dilakukan. Laporan keuangan (ekonomi) perusahaan merupakan dokumen sosial dan politik serta juga dokumen ekonomi karena tidak dapat diisolasikan dari masyrakat dan lingkungan, perusahaan wajib memperhatikan dan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

f. Teori Keadilan

Menurut teori ini, dalam sistem kapitalisasi pasar bebas laba/rugi sangat tergantung pada *the uniqual rewards and privileges* yang terdapat dalam laba dan kompensasi. Laba/rugi mencerminkan ketidakadilan antar pihak yang dinikmati atau diderita suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus adil terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang sudah turut menanggung dampak eksternalitas perusahaan melalui program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Kemauan baik perusahaan untuk melaksanakan atau menjalankan beberapa program atau kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan menyisihkan dana secara berkelanjutan, sebenarnya juga akan mendatangkan sejumlah manfaat bagi perusahaan itu sendiri, diantaranya adalah (Andreas, 2010, p. 90) :

a. Sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keuanggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang.
b. Memperkokoh profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan.
c. Meningkatnya akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor, kreditor, pemasok, dan konsumen.
d. Meningkatnya komitmen, etos kerja, efisiensi dan produktivitas karyawan.
e. Menurunnya kerentanan gejolak sosial dan resistensi dari komunitas sekitarnya karena diperhatikan dan dihargai perusahaan.
f. Meningkatnya reputasi, *goodwill,*dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Teori Perlakuan Akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

a. Andreas Lako

Biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang memiliki manfaat ekonomik yang cukup di masa datang, perlakuan akuntansinya adalah sebagai pengeluaran investasi (aset) dan harus diamortisasi selama taksiran umur manfaat ekonomisnya. Biaya-biaya tersebut dilaporkan di neraca dalam kelompok investasi *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan untuk biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tidak atau kurang memiliki potensi manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa depan, perlakuan akuntansinya adalah sebagai pengeluaran beban atau kerugian dan dilaporkan dalam laporan laba-rugi pada kelompok biaya operasional atau biaya kontinjen.

b. Nor Hadi

Dilihat dari kemanfaatan biaya sosial terdapat kemanfaatan jangka pendek dan jangka panjang serta terdapat pengakuan yang memiliki potensi ekonomi di masa depan, maka biaya tanggungjawab dikategorikan *current expenditure* dan *capital expenditure*. Menurut ISAK 3 menyatakan bahwa apabila biaya tanggungjawab sosial tidak bisa dikaitkan dengan perolehan suatu aktiva, maka biaya tersebut harus dibebankan pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual. Pengeluaran *current expenditure* termasuk pada jenis biaya ini. Perlakuan biaya sosial tidak dibebankan pada saat dibayar, melainkan pada saat terdapat kewajiban konstruktif atau legal pada

Perseroan, yang muncul ketika pada saat keputusan RUPS atau Direksi menetapkan besarnya biaya sosial dan lingkungan. Pengeluaran jangka panjang (*capital expenditure*) dan pengeluarannya yang terkait dengan perolehan aktiva tetap baik berwujud maupun tidak berwujud, Perseroan wajib melakukan kapitalisasi dan mencatatnya sebagai beban harga perolehan aktiva tetap.

Beban

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keunangan (KDPP-LK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), beban *(expenses)* adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aktiva tetap). Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aktiva, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk ((IAI), Kerangka Dasar Penyajian Penyusunan Laporan Keuangan, 2010).

Aktiva Tidak Berwujud

Aktiva tidak berwujud *(in tangible asset)* adalah aktiva tak lancar *(noncurrent asset)* dan tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lain. Salah satu karakteristik aktiva tidak berwujud yang paling penting adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaatnya di kemudian hari ((IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 19 Aktiva Tak Berwujud, 2010).

Standart Pelaporan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Beberapa di antara pemakai ini memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup dalam laporan keuangan. Namun demikian, banyak pemakai sangat tergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Laporan keuangan dengan tujuan khusus seperti prospektus, dan perhitungan yang dilakukan untuk tujuan perpajakan tidak termasuk dalam di dalam laporan keuangan umum ini ((IAI), Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan, 2010).

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga ((IAI), Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan, 2010).

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan demikian, tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. Berhubung para investor merupakan penanam modal berisiko ke perusahaan, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai lain ((IAI), Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan, 2010).

Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Manajemen memiliki kemampuan untuk

menentukan bentuk dan isi informasi tambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun demikian, pelaporan informasi semacam itu berada di luar ruang lingkup kerangka dasar ini. Bagaimanapun juga, laporan keuangan yang diterbitkan didasarkan pada informasi yang digunakan manajemen tentang posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan ((IAI), Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan, 2010).

METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian berbentuk *study case* yang dilakukan terfokus pada satu objek penelitian saja, seperti satu perusahaan yang diamati atau dijadikan penelitian. Selain itu, peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif sebagai metode baru, karena populasinya belum lama, dinamakan metode postpostivistik karena berdasarkan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2011, p. 7)

Dengan demikian, peneliti perlu memahami lebih mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti dengan terjun langsung ke dalamnya sehinga nantinya akan menemukan jawaban dari permasalahan yang ada serta dapat juga membentuk suatu gambaran dan teori baru.

Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan unit analisis perusahaan yang melaksanakan kegiatan atau program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perusahaan tersebut adalah PT. PLN (Persero) di Surabaya. Pelaksanaan penelitian dilakukan di PLN Distribusi Jatim yang terletak di Jl. Embong Trengguli no 19-21 Surabaya.

Metode Pengumpulan Data

a. Observasi Partisipasi Pasif

Observasi ini dilakukan dengan cara datang di tempat kegiatan subjek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap (Sugiyono, 2011, p. 227).

b. Wawancara Semiterstruktur

Wawancara semiterstruktur merupakan kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana fihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya (Sugiyono, 2011, p. 233). Peneliti memilih model wawancara seperti ini karena peneliti ingin mendapatkan pendapat-pendapat dan ide-ide dari objek yang diteliti mengenai perlakuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia. Wawancara dilakukan pada kepala bagian *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kepala bagian akuntansi keuangan PT. PLN (Persero) di Surabaya.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau laporan. Dokumen berbentuk tulisan yang akan digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah dokumen berupa laporan keuangan perusahaan yaitu neraca dan laporan laba rugi periode 2010 sampai 2012 di mana perusahaan telah melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibiliy* (CSR).

Rencana Pengujian Keabsahan Data

a. Peningkatan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan dapat meningkatkan kredibilitas data karena dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak (Sugiyono, 2011, p. 272).

b. Menggunakan bahan referensi

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. (Sugiyono, 2011, p. 275).

Teknik Analisi Data

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah proses pertama yang dilakukan pada penelitian ini. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian. Data tersebut diperoleh secara langsung dan tidak langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumen yang ada di subjek penelitian yaitu PT. PLN (Persero) di Surabaya. Data tersebut berupa jawaban dari hasil wawancara dan observasi pada bagian *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan bagian akuntansi keuangan. Penunjang dari hasil wawancara tersebut diperkuat lagi dengan adanya data asli berupa dokumen tertulis yang diberikan yaitu berupa laporan keuangan dan tahunan milik perusahaan.

Pada saat pengumpulan data, tidak semua data yang dapat dikumpulkan baik dari hasil observasi, wawancara maupun dari dokumen yang ada, dipakai semuanya karena tidak semua data berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Data tersebut harus dipilah-pilah lagi mana saja dari data tersebut yang nantinya akan menunjang penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan data harus tetap mengacu pada rumusan masalah penelitian yang ada agar data yang dikumpulkan tidak melenceng terlalu jauh dari apa yang diperlukan seharusnya.

b. Analisis perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Analisis yang dilakukan berupa analisis mendalam pada data yang sudah dikumpulkan yang berasal dari jawaban-jawaban hasil wawancara dan observasi serta data berupa angka-angka yang berasal dari laporan keuangan. Analisis tersebut dilakukan dengan cara menelaah dan mencocokkan perlakuan akuntansi pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang digunakan oleh perusahaan dengan permasalahan, standart akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) serta asumsi yang ada mengenai perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diasumsikan pada penelitian ini. Analisis ini dilakukan mulai dari analisis terhadap pengakuan, pengukuran, pencatatan, sampai dengan penyajian dan pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada laporan tahunan perusahaan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif yang merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin pada aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Analisis ini yang nantinya akan membantu peneliti untuk menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah yang ada pada penelitian.

c. Pembahasan

Pembahasan ini dilakukan setelah proses analisis perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilakukan. Pembahasan ini dilakukan dengan cara membahas lebih dalam lagi mengenai hasil analisis perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, pada pembahasan ini akan dibahas lebih lanjut lagi terhadap data-data yang diperoleh baik berupa dokumen laporan keuangan yang ada dan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan sumber secara langsung pada saat penelitian sehingga pada pembahasan ini akan menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Termasuk dampak yang akan ditimbulkan dari hasil jawaban perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk perusahaan. Pembahasan yang dilakukan tidak hanya asal membahas saja melainkan harus tetap memperhatikan peraturan akuntansi yang berlaku umum dan asumsi yang ada.

d. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulan dilakukan dengan melihat hasil akhir dari analisis data yang dilakukan. Setelah terjawab maka diberikan kesimpulan atau hasil akhir yang merupakan jawaban inti dari permasalahan yang ada pada penelitian.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Laporan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dibuat tersendiri dalam bentuk *sustainability reporting* (laporan keberlanjutan), yang nantinya juga akan dimasukkan menjadi satu kesatuan dalam laporan tahunan perusahaan. Berikut ini beberapa program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) di Surabaya :

1. *Community Relation*

Kegiatan ini menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Beberapa kegiatan yang dilakukan PLN antara lain: Melaksanakan sosialisasi instalasi listrik, contohnya melalui penerangan kepada pelajar SMA di Jawa Barat tentang SUTT/SUTET, dan melaksanakan sosialisasi bahaya laying-layang di daerah Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur.

2. *Community Services*

Program bantuan dalam kegiatan ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2011, antara lain memberikan :

a. Bantuan bencana alam.
b. Bantuan peningkatan kesehatan di sekitar instalasi PLN, antara lain di Kelurahan Asemrowo, Surabaya yang berada di sekitar SUTT 150kV Sawahan-Waru.
c. Bantuan sarana umum pemasangan turap untuk warga pedesaan di Kecamatan Rumpin – Kabupaten Bogor, Jawa Barat serta bantuan pengaspalan jalan umum di Bogor - Buleleng, Bali.
d. Bantuan perbaikan sarana ibadah.
e. Operasi Katarak gratis di Aceh, Pekanbaru, Jawa Barat, dan kota lainnya di Indonesia.
f. Bantuan Sarana air bersih.

3. *Community Empowering*

Kegiatan ini terdiri dari program-program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Bantuan produksi dan pengembangan pakan ikan alternatif di sekitar SUTET, bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UGM.
b. Bantuan alat pertanian kepada kelompok tani Ngaran Jaya Kabupaten Kulonprogo, Jawa Tengah.
c. Bantuan pengembangan budi daya pertanian papaya organik untuk komunitas di sekitar Gunung Merapi Yogyakarta yang bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UGM.
d. Bantuan pengembangan pola tanam padi SRI produktivitas tinggi.
e. Bantuan pelatihan pengembangan budi daya tanaman organik di sekitar instalasi PLN.
f. Pemberdayaan anggota PKK Asemrowo, Surabaya.
g. Program budi daya jamur tiram masyarakat Desa Umbul Metro, Lampung.
h. Bantuan Pelatihan budidaya rumput lain di Kalimantan Timur.
i. Bantuan Pelatihan kelompok tani tambak ikan tawar Danau Sentani, Papua.
j. Pelatihan manajemen UKM dan kiat-kiat pengembangan UKM di Papua.
k. Pelatihan manajemen pemasaran dan keuangan bagi pengrajin *souvenir* khas Papua.
l. Penyuluhan pertanian untuk petani di Genyem, Papua
m. Pemberian bibit coklat masyarakat dibawah RO W P3B, Sumatera.

4. Pelestarian alam

Penanaman dan kegiatan pemeliharaan pohon yang selama ini telah rutin dilakukan untuk membantu lingkungan dalam pemulihan dampak aktivitas manusia. Pada tahun 2010 sampai dengan 2011, PLN telah menanam pohon sebanyak 126.705 pohon.

Analisis Perlakuan *Akuntansi Corporate Social Responsibility* (CSR)

Berdasarkan keterangan dari responden Kepala Bagian Akuntansi dan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa setiap dana yang dikeluarkan akibat pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini diakui langsung ke beban. Beban yang dimaksud bukanlah beban dengan akun beban *Corporate Social Responsibility* (CSR), melainkan dimasukkan dalam akun beban lain-lain. Diperlakukannya *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai beban karena PT. PLN (Persero) menganggap dan berpandangan jika dana yang dikeluarkan pada saat terjadinya harus dimasukkan sebagai beban, dan karena jumlah dana yang dikeluarkan belum pasti dan jumlahnya tidak material atau bisa dikatakan jumlah yang tidak terlalu banyak tiap bulan dan bahkan tiap tahunnya sehingga beban ini dimasukkan ke dalam beban lain-lain.

Berikut ini perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai beban yang dimasukkan pada akun beban lain-lain pada laporan tahunan perusahaan yang berdasarkan pada Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (KDPP-LK) yang dianut oleh PT. PLN (Persero) di Surabaya :

1. Pengakuan

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini diakui sebagai beban lain-lain oleh perusahaan karena biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini tidak begitu material atau bisa dikatakan dalam nominal yang sedikit untuk perusahaan dibandingkan dengan total beban. Hal ini terlihat pada laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan seperti yang ada pada laporan keuangan perusahaan periode 2010, samapai 2012 pada lampiran.

2. Pengukuran

Diakuinya *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai beban pada akun beban lain-lain perusahaan, membuat pengukuran *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini dilakukan berdasarkan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (KDPP-LK) mengenai beban. Beban diukur besarnya berdasarkan banyaknya biaya atau dana yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika terjadinya transaksi atau kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini adalah dana yang dikeluarkan pada saat kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berlangsung. Beban lain-lain tidak hanya meliputi beban dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) saja, akan tetapi terdiri dari beban-beban sebagai berikut :

a. Beban selisih penerimaan BBM
b. Beban selisih harga material
c. Bantuan korban bencana alam (ComDev)
d. Bantuan pendidikan/pelatihan (ComDev)
e. Bantuan peningkatan kesehatan (ComDev)
f. Bantuan pengembangan pra/sarana umum (ComDev)
g. Bantuan sarana ibadah (ComDev)
h. Beban administrasi (ComDev)
i. Rugi akibat percepatan penyusutan AT akan dihapus
j. Beban penyusutan ATTB yang akan diperbaiki
k. Rugi akibat percepatan material AT akan dihapus
l. Beban penyesuaian tahun lalu
m. Laba (Rugi) dari selisih pembulatan
n. Beban lain-lain lainnya

3. Pencatatan

Diakuinya *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai beban yang dimasukkan dalam akun beban lain-lain, maka menyebabkan pencatatan yang dilakukan adalah pencatatan yang dilakukan untuk beban. Pencatatan untuk beban adalah sebagai berikut :

Beban lain-lain	xxx	
Kas / hutang lain-lain		xxx

PT. PLN (Persero) di Surabaya juga melakukan penjurnalan dari setiap transaksi yang dilakukan berkaitan dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada saat perusahaan menerima dana *droping* dari pusat, maka jurnalnya adalah :

Bank Unit	xxx	
Droping dana dari Pusat		xxx

Sedangkan ketika terjadinya pengeluaran biaya, maka jurnalnya

Biaya Lain-lain	xxx	
Bank Unit		xxx

4. Penyajian dan Pelaporan

Penyajian dan pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai beban lain-lain akan disajikan dan dilaporkan pada laporan laba rugi perusahaan. Hal ini bisa dilihat pada lampiran.

Pembahasan

PT. PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada data yang ada diketahui bahwa tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. PLN (Persero) di Surabaya ini dibedakan menjadi dua bentuk program, diantaranya adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program *Corporate Social Responsibility* (CSR) itu sendiri. Pada BUMN ini, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dibedakan dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sementara, pada umumnya perusahaan menggabungkan ke dua program tersebut dalam satu konteks yaitu kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

PT. PLN (persero) di Surabaya membedakan kedua program ini meskipun pada intinya keduanya memiliki peran dalam pemberian perhatian kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan berbedanya sumber dana

yang digunakan untuk pelaksanaan kedua program ini. Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) diperoleh dari *droping* pusat dan penyisihan laba perusahaan, sedangkan untuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) selain dari *droping* pusat juga diperoleh dari dana operasional perusahaan. Selain itu, berbedanya kedua program tersebut juga berbedanya dasar hukum pelaksanaan program tersebut. Dasar hukum yang digunakan pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah Peraturan Menteri BUMN no. 05/MBU/2007 dan Keputusan Direksi SOP PKBL PT. PLN, sedangkan untuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sendiri dasar hukumnya dari UU no. 40 tahun 2007 pasal 74 mengenai Perseroan Terbatas (PT). Perbedaan kedua program tersebut semakin diperkuat lagi dengan berbedanya acuan perlakuan akuntansi yang digunakan. Perlakuan akuntansi untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berdasarkan kebijakan akuntansi yang ada di Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) di mana diperlakukan sebagai pinjaman modal kerja (piutang) pada laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sedangkan di program *Corporate Social Responsibility* (CSR) menggunakan kebijakan akuntansi yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini dilaksanakan di semua PLN baik di pusat maupun di unit. Pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya di *handle* oleh pusat, sedangkan unit hanyalah sebagai pelaksana saja. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di unit sewaktu-waktu bisa dihentikan oleh pusat. Dalam hal ini pusat memang memegang kendali penuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pusat yang menentukan format dalam pembuatan laporan yang nantinya juga akan digunakan oleh setiap kantor PLN baik pusat maupun unit. Pusat juga yang membuat laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) yang tentunya merupakan gabungan dari hasil laporan kegiatan oleh unit juga. Semua laporan yang ada di *sustainability reporting* tersebut akan dimasukkan juga dalam laporan tahunan perusahaan secara keseluruhan. Hanya saja setiap unit juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan yang telah dilakukan baik kegiatan operasional perusahaan maupun kegiatan sosial dari pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang juga dilaksanakan oleh setiap unit.

Jika dilihat dari data yang ada di website pusat, menyatakan bahwa laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilaporkan berupa *Sustainability Reporting Guidelines versi* 3.0 yang mengacu pada standart *Global Reporting Initiative* (GRI) dengan pemenuhan indikator-indikator yang ada, yang terlihat pada lampiran Format *Sustainability Reporting Guidelines versi* 3.0 dan Referensi Silang *Sustainability Reporting* PT. PLN (Persero) Periode 2010 dan 2011. Hasil laporan yang ada tersebut memang dimasukkan lagi ke laporan tahunan perusahaan. Hanya saja, yang menjadi kendalanya adalah pada laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) tidak dijelaskan secara mendetail mengenai perlakuan akuntansinya. Laporan ini lebih banyak melaporkan dalam bentuk narasi, sedangkan untuk konteks keuangannya hanya dilaporkan mengenai anggaran dan realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan tersebut.

Hal ini juga semakin ditunjang dengan tidak adanya akun khusus yang berkaitan dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan sumber data, dikatakan bahwa memang untuk rincian biayanya tidak dijelaskan secara rinci di

laporan tahunan perusahaan. Rinciannya hanya berupa anggaran dan realisasi penggunaan dana yang telah dianggarkan yang ada pada laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*). Inilah yang membuat semakin kompleksnya permasalahan perlakuan akuntansi untuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perusahaan mengambil jalan untuk memperlakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai beban lain-lain.

Belum adanya standar atau peraturan yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) baik di PSAK dan IFRS ini menyebabkan PT. PLN (Persero) tidak berani atau tidak mau memperlakukan dana yang dikeluarkan untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) selain sebagai beban lain-lain atau dalam hal ini sebagai aktiva tidak berwujud. Namun, PT. PLN juga tidak menampik jika *Corporate Social Responsibility* (CSR) dimasukkan sebagai aktiva tidak berwujud, karena memang memenuhi karakteristik aktiva tidak berwujud yaitu tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaatnya di kemuadian hari. Akan tetapi jika hal ini dimasukkan ke aktiva tidak berwujud tidak bisa diterapkan karena jumlahnya yang tidak material.

Pada awal tahun pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu tahun 2010, besarnya dana yang digunakan untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sekitar Rp 1.620.740.400,- atau sekitar 77% dari total beban lain-lain Rp 2.107.631.373,-. Jika dibandingkan dengan total beban usaha hanya sekitar 0,008% dari total beban usaha sebesar Rp 19.984.168.103.575,-. Tahun tersebut dana terbesar digunakan untuk program Bantuan Pendidikan/Pelatihan yang mengeluarkan dana sebesar Rp 901.340.400,- atau sekitar 56% dari total dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada tahun tersebut, sedangkan dana terendah digunakan untuk program Bantuan Korban Bencana Alam yang menghabiskan dana sebanyak Rp 17.500.000,- atau sekitar 1% dari total dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) di tahun itu.

Tahun 2011 hanya sebesar Rp 1.500.509.800,- atau sekitar 13% saja dari total beban lain-lain Rp 11.501.011.982,-. Jika dibandingkan dengan total beban usaha hanya sekitar 0,007% dari total beban usaha sebesar Rp 21.454.665.102.268,-. Tahun 2011 pengeluaran terbesar digunakan untuk kegiatan Bantuan Pengembangan Pra/Sarana Umum sejumlah Rp 804.709.800,- atau sekitar 54% dari total biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) di tahun tersebut. Dana terendah digunakan untuk biaya administrasi pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada tahun tersebut yang hanya sebesar Rp 4.500.000,- atau sekitar 0,3% dari total biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) tahun 2011.

Tahun 2012, data yang digunakan adalah data laporan keuangan yang belum audit karena pengambilan data ini pada bulan Januari 2013 di mana pada perusahaan tersebut sedang dilakukan audit sehingga laporan keuangannya belum di sesuaikan sesuai hasil audit. Berdasarkan data laporan keuangan yang belum diaudit, didapatkan data pada tahun 2012, dana yang dikeluarkan untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebesar Rp 627.623.000,- atau sebesar 11% dari total beban lain-lain sebesar Rp 5.621.298.701,-. Jika dibandingkan dengan total beban usaha hanya sekitar 0,002% dari total beban usaha sebesar Rp 25.992.731.615.855,-. Tahun 2012 dana yang terbanyak digunakan untuk kegiatan Bantuan Pendidikan/Pelatihan sebesar Rp 520.000.000,- atau sekitar 83% dari total dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada tahun tersebut, sedangkan dana terendah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Sarana Ibadah

sebesar Rp 107.623.000,- atau sekitar 17% dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) di tahun itu.

Tiga tahun berturut-turut pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) muali tahun 2010-2012, total dana yang telah dikeluarkan untuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebesar Rp 3.748.873.200,-. Dana terbanyak yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp 1.620.740.400,-. Besarnya dana ini sangat signifikan sekali yaitu sebesar 43% dari total dana selama tiga tahun. Pengeluaran dana besar-besaran ini dilakukan karena pada tahun ini merupakan tahun awal perusahaan melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan perusahaan ingin dana yang dikeluarkan langsung mengena di masyarakat. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah dana yang dikeluarkan relative kecil yaitu sejumlah Rp 627.623.000,- atau sekitar 16% dari total dana selama tiga tahun. Rendahnya dana yang digunakan untuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini karena pada tahun ini hanya dua program saja yang dilaksanakan yaitu program Bantuan Pendidikan/Pelatihan dan program Bantuan Sarana Ibadah, sedangkan untuk program yang lainnya tidak dilaksanakan pada tahun ini.

Semua kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanaan tiap tahun berdampak pada citra baik masa depan perusahaan. Hal ini karena semua kegiatan yang dilakukan berbentuk sumbangan dan bantuan, dimana diketahui bahwa sumbangan dan bantuan yang diberikan jelas tidak akan memberikan manfaat saat sumbangan dan bantuan tersebut diberikan, melainkan manfaat masa depan berupa meningkatnya citra baik perusahaan di mata masayarakat, dan manfaat ini juga belum dipastikan akan diperoleh kapan, sehingga jika melihat nilai manfaat masa depannya, maka *Corporate Social Responsibility* (CSR) bisa diperlakukan sebagai aset tidak berwujud perusahaan. PT. PLN juga menyatakan kalaupun ada perusahaan yang memperlakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai aktiva tak berwujud karena perusahaan tersebut kemungkinan bergerak dibidang jasa media yang jelas harus ada aktiva tidak berwujud seperti diperolehnya penghargaan dari apa yang telah dilakukan dalam kegiatan atau program *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena hal itu dapat meningkatkan reputasi dimata pecinta media tersebut dan hal itu merupakan daya saing tertinggi yang dipertaruhkan dalam bidang usaha tersebut.

Masuknya komponen *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini sebagai beban lain-lain, mengakibatkan semakin besarnya atau tingginya komponen biaya yang ada pada laporan laba/rugi perusahaan. Jika perusahaan mengalami laba, maka laba perusahaan akan berkurang karena adanya tambahan komponen biaya atau beban dalam laporan laba/rugi perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan semakin besar lantaran adanya tambahan komponen biaya atau beban yang ditanggung oleh perusahaan.

Menurunnya laba dan meningkatnya kerugian yang dialami oleh perusahaan bisa mengakibatkan menurunnya minat investor kepada perusahaan. Menurunnya minat investor ini membuat perusahaan hanya memiliki sedikit investor akibat perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun, hal ini tidak begitu menjadi permasalahan yang cukup besar bagi perusahaan karena perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN dan merupakan perusahaan monopoli di mana tidak ada pesaingnya. Jadi perusahaan tidak akan kehilangan banyak investor dan pelanggan (*stakeholders*). Pelaksanaan kegiatan atau program *Corporate Social Responsibility*

(CSR) ini membuat perusahaan semakin dicintai oleh *stakeholders*nya meskipun secara profit lebih kecil.

Diperlakukannya program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai beban atau biaya berdampak pada perusahaan baik dampak positif maupun dampak negatif. Selain menurunkan profit yang akan berdampak pada kurangnya minat investor untuk bergabung di dalam perusahaan yang merupakan dampak negatif yang harus diterima perusahaan, pelaksanaan dan perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini sebagai beban atau biaya perusahaan juga memiliki dampak positif. Jika program *Corporate Social Responsibility* (CSR) diperlakukan sebagai beban atau biaya, maka perusahaan akan mendapatkan sebuah keuntungan dari hal ini. Keuntungan yang diperoleh perusahaan selain masih tetap mendapatkan citra baik di mata masyarakat karena pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah beban pajak yang akan ditanggung perusahaan akan menjadi berkurang dari sebelum dilaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan dan diperlakukannya sebagai beban atau biaya perusahaan.

Jika perusahaan mengalami laba, maka perusahaan bisa dipastikan akan memperoleh laba yang kecil karena besarnya beban operasional yang ditanggung oleh perusahaan akibat pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurunnya laba akan mengakibatkan beban pajak yang akan dibayar perusahaan akan menurun dari yang semestinya. Menurunnya pajak yang dibayar tersebut menyebabkan perusahaan memiliki keringanan dalam tanggungan pajak tiap tahunnya. Berdasarkan keterangan dari sumber data, tarif pajak yang digunakan adalah PPh pasal 25 yaitu PPh badan dalam negeri. PT. PLN menjelaskan bahwa perhitungan pajak tersebut tidak dilakukan sendiri oleh PT. PLN melainkan akan dilakukan oleh Kantor Pajak tempat pembayaran pajak dilakukan, yang biasanya akan dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu.

Hal ini juga akan berlaku ketika perusahaan mengalami kerugian. Jika perusahaan mengalami kerugian berarti pendapatan perusahaan lebih kecil dari biaya atau beban operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selain diakibatkan dari pendapatan yang kecil dari laba operasi, kerugian juga bisa diakibatkan dari laba yang tetap konstan setiap tahunnya, hanya saja beban atau biaya operasi perusahaan yang semakin besar atau membengkak akibat perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan yang dimasukkan dalam biaya atau beban dalam kategori biaya atau beban operasi perusahaan. Ketika mengalami kerugian, maka perusahaan tidak akan dipungut pajak atau dengan kata lain perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Dengan kerugian yang diderita oleh perusahaan, justru perusahaan akan memperoleh penghematan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan jika perusahaan mengalami keuntungan. Sama halnya dengan ketika terjadinya laba, ketika terjadi rugi, perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan dalam pembayaran pajaknya yang akan menjadi berkurang dari semestinya.

Terlepas dari dampak positif dan negatif yang diderita perusahaan dari akibat perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai beban atau biaya, pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) seharusnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Hal ini disebabkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukanlah sekedar kegiatan suka rela saja melainkan sudah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan. Semakin diperkuat lagi dengan adanya UU no. 40

tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas. Ini merupakan salah satu bukti kongkrit yang dilakukan pemerintah untuk mengupayakan agar diperolehnya keadilan masyarakat dari perusahaan yang telah membuka dan melakukan usahanya di Indonesia agar masyarakat dan lingkungan tidak saja dieksploitasi terus-menerus tanpa diperhatikan dan diperlakukan dengan layak.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN KETERBATASAN

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada laporan tahunan PT. PLN (Persero) di Surabaya. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan dengan metode kualitatif, objek penelitiannya adalah PT. PLN (Persero) di Surabaya, dapat disimpulkan bahwa pada PT. PLN (Persero), *Corporate Social Responsibility* (CSR) diperlakukan sebagai beban perusahaan yang masuk pada beban lain-lain perusahaan. Alasan diperlakukannya sebagai beban lain-lain karena dana yang dikeluarkan langsung dikeluarkan pada saat terjadinya. Selain itu juga karena jumlahnya tidak material. Padahal jika dilihat dari segi manfaat dimasa mendatang, seharusnya bisa diperlakukan sebagai aktiva tidak berwujud. Belum adanya peraturan di PSAK dan IFRS yang jelas mengenai perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) maka PT. PLN lebih memilih untuk memperlakukan sebagai beban

Perlakuan sebagai beban ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya mengurangi jumlah pajak yang dikenakan karena semakin besar beban, maka semakin kecil laba perusahaan, dan sebaliknya. Perhitungan pajak yang digunakan adalah tarif pajak badan PPh pasal 25. Dampak negatifnya adalah laba perusahaan semakin kecil karena beban perusahaan semakin besar karena adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Penulis menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan belumlah sempurna dan masih memiliki keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, berikut ini akan diberikan saran-saran yang mungkin berguna untuk kepentingan bersama. Saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Diharapkan segera mengatur PSAK yang khusus untuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) sehingga tidak terjadi kerancuan dan bisa diukur dan dilaporkan secara kuantitatif dalam laporan tahunan perusahaan.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, sebaiknya tidak hanya melakukan penelitian di satu perusahaan saja melainkan di beberapa perusahaan, minimal dua perusahaan dengan perlakuan akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berbeda, sehingga bisa dilakukan perbandingan dan pengamatan lebih mendalam sehingga hasilnya lebih valid dan general lagi.

Keterbatasan penelitian ini adalah adanya keraguan jika standar yang digunakan oleh perusahaan bukanlah standar untuk perusahaan umum berupa standar akuntansi keuangan melainkan menggunakan standar akuntansi pemerintahan karena dilihat dari *background* perusahaan yang diteliti adalah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

DAFTAR RUJUKAN

Andreas, Lako. 2010. Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi. Erlangga. Semarang.

Anggara, Fahrizqi. 2010. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Laporan Tahunan

Perusahaan". Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Angling, Mahatma Pian KS. (2010). "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Regulasi Pemerintah terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Laporan Tahunan di Indonesia". Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Anis, C. dan Firman, A. N. 2009. "Retorika dalam Pelaporan *Corporate Social Responsibility*: Analisis Semiotik atas Sustainability Reporting PT. Aneka Tambang Tbk". *Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang*.

Ati, H. dan Ade, A. 2008. "Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Official Website Perusahaan (Studi pada PT. Unilever Indonesia Tbk)". Proceeding Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2008), Depok.

Badan ISO 26000. 2011. ISO 26000, "*The Business Guide to the new Standard on Social Responsibility*". ISO 26000. Jakarta.

Chandra, K dan Indrawati, Y. 2009. "Studi Tentang Penerapan dan Pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk". *Paper Hasil-hasil Penelitian Dosen dan Seminar Nasional*.

CSR, Indonesia. 2010. *Artikel : CSR Indonesia*. Retrieved Desember Jumat, 2010 (http://www.csrindonesia.com).

Edi, Suharto. 2008. *"Corporate Social Responsiibiiliity : What is and Benefits for Corporate"*. Seminar Dua Hari CSR *(Corporate Social Responsibility)*, Jakarta. p 2.

ICA, T. P. 2012. Definisi : *Corporate Forum for Community Development* (CFCD). Online, Sabtu, April, 2012 (http://www.cfcd.or.id).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2010. *Pernyataan Strandar Akuntansi Keuangan*. Ikatan akuntansi Indonesia. Jakarta.

Mas, Achmad Daniri. 2006. "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". Seminar Sehari *"A Promise of Gold Rating : Sustainable CSR"*. p 1.

Mirza. Kepala Bagian *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim di Surabaya. Surabaya. Oktober 2012-Januari 2013.

Narko. Kepala Bagian Akuntansi PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim di Surabaya. Surabaya. November 2012.

Nelly, M. 2011. "Corporate Social Responsibility : Sebuah Pandangan dari Sudut Akuntansi". Jurnal Eksistensi Akuntansi Politeknik Sriwijaya, Palembang. p 14.

Nor Hadi. 2010. *Corporate Social Responsibility.* Graha Ilmu. Semarang.

Presiden Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.

The World Business Council For Sustainable Development (WBCSD).